

# KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Agil Al Furqon

NPP. 32.0542

Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia

Email: [32.0542@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0542@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The high unemployment rate among youth in Banyuwangi Regency is one of the issues that must be addressed by the Banyuwangi Regency government. The author focuses on governmental leadership in youth empowerment so that it can be implemented optimally. **Purpose:** To identify and analyze governmental leadership in youth empowerment in Banyuwangi Regency, East Java Province. **Method:** This study uses Robert J. House's Path-Goal Theory (Thoha, 1983). The research method employed is qualitative, with a descriptive approach and an inductive method. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author indicate that the Banyuwangi Regency government predominantly employs a participative leadership style, especially in youth empowerment programs. Supporting factors for government leadership in youth empowerment include youth regulations, the Dispora Strategic Plan (Renstra), and regional potential. The inhibiting factors consist of limited human resources, facilities, and low youth interest due to education and the large area. The government addresses these challenges by preparing targeted programs, coordinating across various parties, providing space for creativity, improving employee human resources, and disseminating information through social media. **Conclusion:** In general, the Banyuwangi Regency government applies a participative leadership style in youth empowerment, supported by regulations, strategic plans, and regional potential. However, challenges such as limited human resources, facilities, and youth interest influenced by education and the large area exist. The government addresses these issues through targeted programs, cross-sector coordination, capacity building for employees, providing creative space for youth, and disseminating information via social media.

**Keywords:** Leadership, Government, Youth

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingginya angka pengangguran di usia pemuda di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu permasalahan yang harus di hadapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penulis berfokus pada kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan sehingga dapat berjalan secara optimal. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Path-Goal Theory dari Robert J. House (Thoha, 1983). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis adalah pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dominan menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif khususnya dalam program pemberdayaan kepemudaan. Faktor pendukung kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan adalah adanya peraturan kepemudaan, Renstra Dispora, dan potensi daerah. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya SDM, sarana, serta minat pemuda akibat pendidikan dan luas wilayah. Pemerintah mengatasinya dengan menyiapkan program yang tepat sasaran, berkoordinasi lintas pihak, memberi ruang kreasi, meningkatkan SDM pegawai, dan menyebarkan informasi melalui media sosial. **Kesimpulan:** Secara umum, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dalam pemberdayaan kepemudaan dengan dukungan regulasi, rencana strategis, dan potensi daerah. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana, dan minat pemuda yang dipengaruhi oleh pendidikan dan luas wilayah. Pemerintah mengatasi hal ini melalui program terarah, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pegawai, pemberian ruang kreasi bagi pemuda, serta penyebaran informasi lewat media sosial.

**Kata kunci:** Kepemimpinan, Pemerintah, Kepemudaan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara ideal akan tercipta jika memiliki pemimpin yang berkualitas dan memenuhi syarat sebagai pemimpin yang baik. Kesuksesan sebuah negara dapat dilihat dari kualitas pemimpin negara yang terpilih dari suara rakyat. Pemilihan pemimpin dinilai sangat penting karena berpengaruh terhadap masa depan sebuah negara. Peran seorang pemimpin sebagai pelatih memiliki signifikansi besar dalam membantu anggota organisasi mengembangkan potensi mereka sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan (Qoirunnisa, Hayat, & Suyeno, 2024). Pemerintah daerah dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat menangani permasalahan yang dihadapi warga secara langsung. Keberhasilan atau kegagalan program pemerintah pusat dalam menjangkau masyarakat sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan memengaruhi kinerja pemerintah pusat. Pada akhirnya, kinerja pemerintah daerah akan berdampak pada pembangunan. (Rahayu, 2018)

Menurut Sondang P. Siagian (Kamarasyid, 2019) menyatakan Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan dan keunggulan, terutama dalam suatu bidang tertentu, sehingga mampu memengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam menjalankan berbagai aktivitas guna mencapai satu atau beberapa tujuan. *By integrating leadership strategies that enhances motivation and engagement, organizations can improve their effectiveness and service delivery* (Iddrisu & Mohammed, 2025),

artinya dengan mengintegrasikan strategi kepemimpinan yang meningkatkan motivasi dan keterlibatan, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan pelayanan mereka. Suatu program pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik, yang seharusnya didahului dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang dimaksud disini tentulah harus yang bersifat partisipatif, yang melibatkan semua elemen masyarakat yang terkait, terutama yang akan menjadi kelompok sasaran, juga harus termasuk didalamnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dilaksanakan bersama masyarakat (Hamid, 2018).

Era desentralisasi telah membawa pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah, kewenangan yang diberikan di pundak pemerintah daerah menjadikannya sebagai aktor penting yang akan menentukan nasib dan wajah kemajuan daerahnya (Wargadinata, 2016). *Leadership is closely related to the ability to achieve the mission and goals of an organization* (Wargadinata E. L., 2021). Yang berarti bahwa kepemimpinan terkait erat dengan kemampuan untuk mencapai misi dan tujuan suatu organisasi. *Engineering leadership is a method or way to be possessed by a leader to influence or direct the subordinates to act in accordance with what is expected by the leader* (Alma'arif, 2013). Artinya Kepemimpinan teknik adalah metode atau cara yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau mengarahkan bawahan agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemimpin. Tujuan diteruskannya pelaksanaan urusan pemerintah kepada daerah adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kaderisasi politik pada tingkat lokal. Untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Daerah perlu membentuk erangkat daerah guna mewartakan pelaksanaan urusan yang diserahkan (Khairi, 2021).

Pelatihan adalah wujud dari keinginan untuk meningkatkan diri dan mempertahankan eksistensi organisasi. Pelatihan memuat banyak praktek, sehingga memberikan kesan atau pengalaman nyata tentang suatu ilmu pengetahuan. mengikuti berbagai pelatihan dapat memperkuat atau mengasah pengetahuan yang didapat (Mawardi, 2021). Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan (Mardikanto, 2013). Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda merupakan individu dengan karakteristik unik, seperti bersikap revolusioner, optimis, berpikiran progresif, serta memiliki moralitas dan sifat-sifat lain yang dijalankan dengan semangat muda demi membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Peran pemuda sangatlah vital dalam kehidupan suatu bangsa. Sepanjang sejarah, pemuda selalu menjadi pilar utama sekaligus penggerak perubahan sosial dalam upaya meraih kemerdekaan dan kemajuan bangsa (Muqsith, 2019).

Pemberdayaan kaum muda mencakup pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk membekali kaum muda dengan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat (Muhammadiyah, et al., 2023). *Volunteers are essential to the viability of a large segment of youth development programs* (Dubois, 2020), artinya adalah Relawan sangat penting bagi keberlangsungan sebagian besar program pengembangan pemuda. *Youth entrepreneurship is a significant means of reducing unemployment, crime, and brain drain* (Ofosu-Appiah, Boahen, & Agbenyegah, 2025), Yang artinya Kewirausahaan pemuda merupakan cara penting untuk mengurangi pengangguran, kejahatan, dan kebocoran sumber daya manusia.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten banyuwangi. Faktor SDM pegawai sebagai pendukung program merupakan salah satunya. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi memiliki 47 pegawai yang berasal dari ASN dan NON ASN tanpa adanya CPNS. Jumlah pegawai mengalami penurunan karena disebabkan beberapa pegawai berstatus purnatugas atau pensiun. Purna tugas menyebabkan penurunan kinerja dinas karena kurangnya SDM yang tersedia. Bidang Pemuda mendapatkan dampak yang signifikan karena beberapa jabatan yang kosong berada di Bidang Pemuda. kekosongan jabatan inilah yang menyebabkan pelayanan terkait kepemudaan tidak berjalan secara optimal.

Menurut LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Banyuwangi pada Tahun 2024 melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga dengan total 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 19.521.374.574,00, dengan realisasi pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.219.395.425,31, atau 93,33 % dari pagu anggaran.

Belanja operasi Dinas Pemuda dan Olahraga terinci dibawah ini :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 3.237.787.746,- teralisasi Rp. 2.363.333.026,-
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.216.184.428,- teralisasi Rp.11.791.235.633.27
3. Belanja hibah Rp. 3.835.000.000,- teralisasi Rp. 3.835.000.000,-
4. Belanja modal Rp. 232.402.400,- teralisasi Rp 230.826.766,04,-

Data di atas menunjukkan bahwa anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tidak terserap dengan maksimal. Terbukti hanya 93% anggaran yang terealisasi dari pagu anggaran yang direncanakan. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal biasanya disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten banyuwangi.

**Tabel 1. 1**  
**Program dan Kegiatan Kepemudaan**

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja program dan kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	0.57 %	0.19	32,83
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe-mudaan	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	1405 Orang	625 Orang	44,48
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Dibina	20 Organisasi	2 Organisasi	10 %

Sumber : LKJIP DISPORA BANYUWANGI 2024

Pada data di atas membuktikan bahwa kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dibidang kepemudaan jauh antara realisasi dan target yang telah direncanakan. Permasalahan kepemudaan di dispora merupakan salah satu permasalahan pokok yang harus dievaluasi dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para pemuda.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian pertama adalah skripsi dari Isra Yulfia Ningsih, (2022). Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepemimpinan kepala daerah dalam konteks tersebut. Penelitian ke dua adalah Ahmad Ali As'adi, (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Industri Kreatif Anak Muda Ronggolawe (INKAGO) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Penelitian ke tiga adalah Moh. Alfian Adam, (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kota Blitar. Penelitian ke empat adalah Muhammad Ridja Moenpratama, (2022) Skripsi ini membahas tentang Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda di Kota Tanjungpinang. Penelitian terakhir adalah Ahmad Fahroby, (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. RUSINDO EXPERTIZA INSPEKCIYA Pekanbaru

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kepemimpinan pemerintahan dalam kegiatan pemberdayaan pemuda dalam kegiatan membudayakan pemuda melalui program produk pemerintah daerah yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni memfokuskan kepada pemuda yang nantinya menjadi pemegang estafet kepemimpinan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan menggunakan dekriptif kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni, dan budaya. Adapaun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

## II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana faktor kepemimpinan dalam pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Untuk melakukannya secara sistematis dan ilmiah, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena lebih cocok untuk jenis penelitian ini karena masalahnya berada dalam konteks sosial yang terus berubah. Sebagaimana dijelaskan oleh Simangunsong (2016), setiap penelitian kualitatif pemerintahan dapat menggunakan berbagai pendekatan desain penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif alami, yaitu fenomena muncul secara acak sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif berfokus pada pencarian makna. Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa makna yang ditentukan dalam penelitian kualitatif berbeda dari pertanyaan yang dirumuskan menjadi “topik penelitian yang bersifat subjektif dan multiple” (Simangunsong, 2016).

Kepemimpinan pemerintahan dan pemberdayaan pemuda merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan banyak aktor, interaksi sosial, nilai, serta konteks lokal yang khas. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menangkap realitas secara menyeluruh dan mendalam, sehingga dapat memahami proses, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan kepemudaan di Banyuwangi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), serta memperdalam pemahaman mengenai satu atau lebih fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2013). Dalam melaksanakan penelitian peneliti menggunakan Path Goal Theory milik Robert House (Thoha, 1983). Path Goal Theory menjelaskan ada 4 tipe atau gaya utama, tipe tersebut antara lain:

1. Kepemimpinan direktif (Directive Leadership)
2. Kepemimpinan yang mendukung (Supportive Leadership)
3. Kepemimpinan yang partisipatif (Participate Leadership)
4. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi (Achievement Oriented Leadership)

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dengan percaya diri bahwa informan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kualifikasinya dan kapasitasnya. Penelitian dilaksanakan selama 21 hari dengan melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, yang dapat memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan kepemudaan. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik purposive sampling sebagai pendekatan yang tepat. Beberapa informan antara lain :

### Public Sector

1. Bupati Banyuwangi
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
3. Camat Muncar
4. Kepala Bidang Pemuda
5. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda
7. Kepala Desa Sumberberas

### Society

8. Tokoh Pemuda

9. Tokoh Masyarakat
10. Tokoh Agama
11. Tokoh Perempuan
12. Tokoh Pendidik

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi analisis Path Goal Theory milik Robert House, faktor pendukung, faktor penghambat dan Upaya dalam mengatasi faktor penghambat kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Kepemimpinan Pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Path Goal Theory**

Gaya kepemimpinan menurut Path-Goal Theory selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Path-Goal Theory dikembangkan oleh Robert J. House memuat ada 4 gaya kepemimpinan sebagai dasar teori tersebut. 4 gaya kepemimpinan tersebut adalah :

1. Kepemimpinan direktif (Directive Leadership)
2. Kepemimpinan yang mendukung (Supportive Leadership)
3. Kepemimpinan yang partisipatif (Participate Leadership)
4. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi (Achievement Oriented Leadership)

Penerapan gaya kepemimpinan direktif oleh pemerintah Banyuwangi tercermin dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Gaya ini efektif pada tahap awal pelaksanaan program karena memberikan arah kebijakan yang jelas, namun kurang berpengaruh pada proses pemberdayaan kepemudaan. Gaya kepemimpinan suportif yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai langkah awal untuk memotivasi pemuda mengembangkan kemampuan dengan menciptakan suasana nyaman serta memberikan dukungan fasilitas dan moral. Dukungan tanpa dibarengi dengan aktifitas dari para pemuda menjadikan gaya ini kurang berpengaruh terhadap pemberdayaan kepemudaan. Pemerintah menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dalam program pemberdayaan pemuda untuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan daerah. Gaya ini dianggap paling efektif karena menyesuaikan program dengan potensi daerah dan kebutuhan pemuda, terutama dalam mengatasi pengangguran. Bupati Banyuwangi menjadikan gaya ini sebagai landasan utama dalam program pemberdayaan kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi untuk mengapresiasi pemuda berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pendekatan ini efektif untuk memotivasi pengembangan kemampuan, namun kurang cocok dalam pemberdayaan kepemudaan karena lebih menekankan hasil akhir daripada proses pembelajaran.

**Tabel 3. 1**  
**Karakteristik Gaya Kepemimpinan**

	<b>Direktif</b>	<b>Suportif</b>	<b>Partisipatif</b>	<b>Orientasi pada prestasi</b>
<b>Karakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegas</li> <li>• Mengarahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung</li> <li>• Kesejahteraan anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peduli</li> <li>• Terbuka</li> <li>• Komunikasi dua arah</li> <li>• Keaktifan anggota</li> <li>• Demokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambisius</li> <li>• Fokus pada hasil</li> </ul>

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan teori path-goal yang mengidentifikasi empat gaya kepemimpinan, ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih banyak menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dalam program kepemudaan. Pilihan gaya ini dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif dari para pemuda, sehingga sejalan dengan tujuan utama program kepemudaan.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepemimpinan Pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

Faktor pendukung adalah berbagai hal atau keadaan yang dapat membantu seseorang dalam melaksanakan atau mewujudkan sesuatu agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan lebih mudah. Dengan adanya faktor pendukung, suatu kegiatan atau program memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, mengalami kemajuan, dan menghasilkan dampak yang lebih positif. Faktor pendukung internal program pemberdayaan pemuda adalah Penyusunan peraturan daerah serta Renstra Dispora sebagai pedoman kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program. juga menjadi landasan hukum yang penting. Komitmen pemerintah untuk tidak menyelesaikan masalah secara sementara, tetapi juga menjalankan program secara berkelanjutan. Dukungan internal lainnya adalah kepedulian dari pimpinan dan staf pemerintah. Faktor pendukung eksternal utama adalah potensi kebudayaan dan pariwisata Banyuwangi yang menarik minat pemuda untuk mengikuti program pemberdayaan. Keunggulan ini menjadi modal penting dalam menciptakan program yang menarik, melibatkan pemuda dalam pengelolaan, promosi, dan pelestarian budaya serta destinasi wisata.

Faktor penghambat merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu, baik berupa kondisi, situasi, maupun elemen tertentu, yang memiliki potensi atau kemampuan untuk menghalangi, menahan, memperlambat, atau bahkan menghentikan jalannya suatu proses, kegiatan, atau pencapaian tujuan yang telah direncanakan atau diharapkan. Faktor penghambat internal pemberdayaan pemuda di Kabupaten Banyuwangi meliputi keterbatasan sumber daya manusia di Dispora akibat kekosongan jabatan, prosedur yang rumit dalam pengajuan program, lemahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya dukungan finansial dan bimbingan dari pemerintah daerah. Faktor penghambat eksternal pemberdayaan pemuda di Banyuwangi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurang meratanya informasi tentang program pemberdayaan serta luas kabupaten banyuwangi yang menimbulkan biaya dan waktu perjalanan yang besar, sehingga menurunkan minat dan partisipasi pemuda.

**Tabel 3. 2**  
**Kesimpulan Faktor Pendukung Dan Penghambat**

	Pendukung		Penghambat	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<b>Faktor</b>	Pembuatan UU dan Renstra Dispora	Potensi daerah	Permasalahan yang ada di Dispora (SDM, Anggaran, Peralatan)	Tingkat pendidikan yang rendah & kondisi geografis daerah

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Kepemimpinan pemerintah setiap tahun memiliki dinamika yang berbeda. Penyelenggaraan pemerintahan tidak serta merta berjalan mulus, pastilah terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah segala aspek, kondisi, atau sumber daya yang memperkuat dan mempermudah peran serta efektivitas kepemimpinan pemerintahan dalam upaya pemberdayaan kepemudaan. Sedangkan faktor penghambat adalah segala kendala, hambatan, atau kekurangan yang dapat mengurangi efektivitas atau menghalangi keberhasilan kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi.

### **3.3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Kepemimpinan Pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

Upaya langsung dalam mengatasi faktor-faktor penghambat kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dapat diartikan sebagai tindakan atau langkah konkret yang dilakukan secara segera dan terfokus oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk menghilangkan atau meminimalisir hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan pemuda. Upaya langsung internal pemberdayaan pemuda di Banyuwangi meliputi identifikasi kebutuhan pemuda dan potensi daerah, penganggaran yang memadai, serta monitoring langsung dengan rapat rutin setiap Jumat, melibatkan Bupati dan perwakilan OPD, berfungsi untuk merencanakan, mengawasi, mengevaluasi, serta koordinasi antar OPD untuk memastikan kelancaran program. Upaya langsung eksternal dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi sangat mengandalkan peran aktif masyarakat sebagai pengawas yang melaporkan hambatan di lapangan, sehingga laporan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dan mengefektifkan program kepemudaan.

Pengertian upaya tidak langsung dalam kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan adalah serangkaian langkah yang diambil untuk membantu menyelesaikan masalah pemberdayaan kepemudaan tanpa harus melakukan tindakan langsung terhadap pemberdayaan kepemudaan tersebut. Upaya tidak langsung internal dalam pemberdayaan pemuda di Banyuwangi meliputi koordinasi antar instansi untuk merancang program sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan kualitas dan jumlah ASN melalui pelatihan dan seleksi yang ketat agar lebih peka dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat. Upaya tidak langsung eksternal dalam pemberdayaan kepemudaan adalah Pemerintah bekerja sama dengan akun media sosial populer agar informasi tersebar luas dan merata ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sehingga mengatasi kurangnya pengetahuan pemuda tentang program kepemudaan.

**Tabel 3. 3**  
**Kesimpulan Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat**

	Langsung		Tidak Langsung	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Upaya	Mengoptimalkan persiapan (perencanaan, monitoring, dan evaluasi)	Peran aktif masyarakat sebagai pengawas program	Koordinasi internal pemerintahan dan meningkatkan SDM kepemudaan	Penyebaran informasi dengan akun medsos swasta

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk dapat mengatasi berbagai faktor penghambat yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan khususnya dalam rangka pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi, maka sangat diperlukan adanya perumusan strategi yang matang serta penerapan langkah-langkah konkret yang bersifat terintegrasi dan sinergis antara berbagai pihak terkait, sehingga upaya pemberdayaan tersebut dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dan kemajuan generasi muda di Kabupaten Banyuwangi.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian tentang kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi yang di laksanakan oleh penulis cukup berbeda dengan penelitian lainnya. Perbedaan hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana sudah baik dan sesuai dengan teori kepemimpinan. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses kepemimpinan berasal dari internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana pada nal pelayanan publik sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal (Ningsih, 2022). Penelitian ini sama menggunakan teori kepemimpinan tetapi penulis lebuh mempertajam dengan Path Goal Theory milik Robert House.
2. Proses yang dilakukan INAKGO adalah melakukan seleksi wilayah, sosialisasi pemberdayaan pemuda melalui program industri kreatif, proses pemberdayaan pemuda yang berisi kajian potensi, penyusunan rencana kelompok, penerapan rencana kelompok dan evaluasi, dan proses yang terakhir adalah pemandirian pemuda (2) Hasil pemberdayaan pemuda oleh INKAGO berupa peningkatan kualitas hidup, kemandirian (baik mandiri secara lingkungan, ekonomi, kreatifitas dan sosial budaya), dan kesejahteraan (As'adi , 2020). Penelian ini sama dibahian pemberdayaan pemuda tetapi menggunakan suatu program sedangkan penulis menganalisis kepemimpinan pemerintahan.

3. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Blitar. Hal ini dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan mampu mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Semakin baik gaya kepemimpinannya maka akan semakin efektif kinerja karyawannya (Adam, 2022). Penelitian ini sama meneliti tentang gaya kepemimpinan tetapi lebih berfokus pada pengaruh gaya bukan analisis gaya yang dilaksanakan oleh penulis.
4. Kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Dispora yaitu memberikan kepercayaan kepada Cabor (cabang olahraga) dalam penanganan para atlet, Dispora dan Koni menyusun dan mengembangkan program-program yang akan dicapai dalam bidang olahraga, dan menyediakan sarana-parasarana untuk pelatihan para atlet. Kendala dalam pembinaan para atlet yaitu kurangnya koordinasi antara Dispora dengan Koni, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan menghentikan semua perhelatan karena COVID-19 (Moenpratama, 2022). Penelitian ini sama dengan menjadikan dispora sebagai Lokasi penelitian, tetapi penulis meneliti tentang kepemimpinan pemerintahan.
5. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. RUSINDO EXPERTIZA INSPEKCIYA Pekanbaru. Dari analisis data, diperoleh koefisien determinasi atau ( $R^2$ ) dalam penelitian ini sebesar 0,596 atau 59,6%, artinya kinerja karyawan PT. RUSINDO EXPERTIZA INSPEKCIYA dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan sebesar 59,6% dan sisanya 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian (Fahroby, 2020). Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan di organisasi sedangkan penulis menganalisis kepemimpinan pemerintahan di daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Setiap gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi memiliki karakteristik yang berbeda, dan berdasarkan teori path-goal yang mengidentifikasi empat gaya kepemimpinan, pemerintah daerah cenderung menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif karena dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif para pemuda sehingga sesuai dengan tujuan utama program kepemudaan. Faktor pendukung meliputi aspek, kondisi, dan sumber daya yang mempermudah peran serta pemerintah dalam pemberdayaan pemuda, sedangkan faktor penghambat berupa hambatan atau kekurangan yang mengurangi keberhasilan kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, dengan memahami kedua faktor ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat dan menerapkan langkah-langkah konkret yang terintegrasi dan sinergis bersama berbagai pihak terkait, guna mengatasi kendala yang ada dan memastikan pemberdayaan kepemudaan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif signifikan bagi perkembangan dan kemajuan generasi muda di Kabupaten Banyuwangi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan hasil serta sebagai arahan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan tidak semua informan dapat diperoleh secara lengkap. Misalnya, meskipun penelitian membahas kepemimpinan, wawancara dengan Bupati sebagai kepala daerah tidak dapat dilakukan. Kedua, kondisi geografis Banyuwangi yang luas menghambat mobilitas peneliti sehingga pelaksanaan penelitian kurang optimal, mengingat Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari banyaknya kurang pada penelitian yang dilaksanakan, sehingga mengharapkan penelitian diteliti oleh dalam atau sebagai referensi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepemudaan di daerah sehingga dapat mengurangi pengangguran usia pemuda (16-30 Tahun)

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Khususnya Dispora Banyuwangi karena telah membantu penulis sebagai tempat penelitaian dilaksanakan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kota Blitar . Malang: UIN MAULANA MALIK IBRAHIM.
- Alma'arif. (2013). LEADERSHIP TECHNIQUE OF SUB-DISTRICT HEAD TO INCREASE APPARATUS . The 4th International Conference on Public Organization (ICONPO), 1-14. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2464>
- As'adi , A. A. (2020). Pemberdayaan Pemuda Melalui Progam Industri Kreatif Anak Muda Ronggolawe (INKAGO) di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. SEMARANG: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.
- Dubois, D. (2020). Supporting volunteerism in youth development programs: Progress and prospects for advancing the knowledge base. Journal of Youth Development, Vol. 14 Page 206-2016. DOI:[10.5195/jyd.2020.986](https://doi.org/10.5195/jyd.2020.986)
- Fahroby, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Russindo Expertiza Inspekciya. Riau: UNIVERSITAS ISLAM RIAU.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, H. (2018). MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Makassar: De La Macca.
- Iddrisu, I., & Mohammed, B. (2025). Exploring the Impact of Leadership Styles on Organizational Effectiveness: the Mediating Role of Employee Motivation and Engagement. Public Organization Review. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00845-w>
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good . Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, ol. 10, no. 2 (2019), pp. 326-353. DOI: [10.32923/maw.v10i2.738](https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738)
- Khairi, H. (2021). Organisasi Sektor Publik. Pekalongan: PT Nasya Management.
- Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Surakarta: ALFABETA.

- Mawardi, S. (2021). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Manajemen Organisasi . Tangerang Selatan: Jurnal PKM Manajemen Bisnis .
- Moenpratama, M. R. (2022). Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan generasi muda di Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.
- Muhammadiyah, M., Tamam, M. B., Wijanarko, T., Mahendika, D., Mas'ud, I. A., Yufrinalis, M., & Setiadi, B. (2023). Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan yang Lebih Cerah: Memberikan Pendidikan, Bimbingan, Peluang Kerja, dan Dukungan Kesehatan Mental . Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 05, Mei, 2023, pp. 354-363. DOI:[10.58812/jpws.v2i5.375](https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.375)
- Muqsith, M. A. (2019). Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial . Jakarta: Buletin Hukum dan Keadilan.
- Ningsih, I. Y. (2022). Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Peningkatan Peningkatan Pelayanan Publik Pada MPP di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ofosu-Appiah, S., Boahen, P., & Agbenyegah, A. (2025). Socio-ecological barriers to youth entrepreneurship in sub-Saharan Africa: a systematic review of empirical evidence. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 14. <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00484-x>
- Qoirunnisa, O. D., Hayat, & Suyeno. (2024). PERAN KEPEMIMPINAN DALAM TRANSFORMASI BIROKRASI: STUDI KASUS PEMIMPIN YANG SUKSES MENDORONG PERUBAHAN. ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management, 106-113. DOI: [10.31539/alignment.v7i1.8922](https://doi.org/10.31539/alignment.v7i1.8922)
- Rahayu, A. S. (2018). PENGANTAR PEMERINTAHAN DAERAH Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Simangunsong, F. (2016). METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN. Bandung: ALFABETA.
- Toha, M. (1983). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: CV. RAJAWALI.
- Wargadinata, E. (2016). KEPEMIMPINAN KOLABORATIF. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume VIII, Edisi 1 (Halaman 1-14). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/73>
- Wargadinata, E. L. (2021). The Leadership Role in The Smart-Village Program in Banyuwangi District, East Java. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 1-15. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429>